

Penerapan Psak 57 Terhadap Perusahaan Rekayasa, Pengadaan, Dan Konstruksi Pt Wijaya Karya Tbk

Ririn Widyastuti Wulaningsih¹, Rimi Gusliana Mais^{2*}, Nadia Salsabila³, Raisa Arifahani Safitri⁴, Roro Hayuningtyas⁵

Akuntansi, Universitas Bung Karno, Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Indonesia, Jakarta Timur, Indonesia

E-mail : Ayin177suwarno@gmail.com, rimi_gusliana@stei.ac.id, sabilanadia12@gmail.com,
raisa.ras2003@gmail.com, rorohayuningtyas@gmail.com

Article Informations

Received:
(30-10-2024)

Accepted
(30-12-2024)

Available Online :
(01-02-2025)

Keywords

Statement of Financial Accounting Standards, Provisions, Contingent Assets, Liabilities Assets

Abstract

This investigate points to analyze the Statement of Financial Accounting Standards 57 concerning Provisions, Contingent Liabilities and Contingent Assets on toll road construction projects conducted by PT Wijaya Karya Tbk (WIKa) in 2023, one of leading construction companies in Indonesia. This research utilizes descriptive qualitative by analyzing financial reports. The data collected based on company annual reports and other relevant sources. The research results in the implementation of Statement of Financial Accounting Standards 57 by PT Wijaya Karya Tbk which has been running well, especially in recognizing provisions related to obligations arising from toll road construction projects. However, there are challenges in disclosing contingent liabilities that require further transparency. This research provides important insights regarding company compliance with applicable accounting standards as well as identifying challenges and opportunities in managing provisions, contingent liabilities, and asset liabilities. The findings of this research are expected to be used as a contribution to the better and more transparent development of accounting practices in Indonesia's industry of construction.

Pendahuluan

Dalam beberapa tahun terakhir, sektor konstruksi di Indonesia telah mengalami pertumbuhan yang signifikan, terutama dengan meningkatnya investasi dalam proyek-proyek besar dalam infrastruktur seperti pembangunan jalan tol, pembangunan jembatan, dan fasilitas umum lainnya. Banyaknya perusahaan-perusahaan konstruksi di Indonesia, salah satunya PT Wijaya Karya Tbk (WIKa), memainkan peran penting dalam mewujudkan visi pembangunan nasional. Namun, dengan semakin kompleksnya proyek-proyek yang ditangani, muncul tantangan dalam hal pengelolaan risiko, khususnya terkait dengan pengungkapan provisi, liabilitas kontinjensi, dan aset kontinjensi. Liabilitas kontinjensi ini, yang mencakup potensi kerugian dari kewajiban yang belum pasti, harus diungkapkan telah tepat dengan standar akuntansi yang berlaku, seperti PSAK 57. Pengungkapan yang tepat sangat penting untuk mengilustrasikan secara akurat terkait kondisi finansial perusahaan serta memastikan transparansi pada para pemangku kepentingan ([Randy et al., 2024](#); [Suriawinata et al., 2023](#)).

Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan digunakan oleh perusahaan di Indonesia sebagai acuan dalam penyusunan laporan keuangannya. Pernyataan yang disusun oleh IAI ini menetapkan aturan pengakuan, pengukuran, dan pengungkapan unsur-unsur laporan keuangan suatu entitas. Fitur utama adalah untuk membantu pengguna keuangan lebih memahami laporan keuangan. (Endaryati, 2022). Penggunaan standar sebagai pedoman memudahkan dalam membandingkan laporan keuangan dengan laporan sebelumnya karena disusun dan dicatat dengan dasar yang sama ([Tommy, 2022](#)).

Fenomena ini menjadi semakin relevan untuk diteliti mengingat ketatnya persaingan di industri konstruksi serta meningkatnya tuntutan terhadap transparansi dan akuntabilitas perusahaan. Pengungkapan atau pengelolaan provisi, liabilitas kontinjensi, dan aset kontinjensi dapat terjadi kesalahan yang berdampak negatif pada kepercayaan investor dan pemegang saham, serta dapat menimbulkan implikasi hukum. Oleh karena itu, untuk memahami bagaimana perusahaan-perusahaan besar, seperti PT Wijaya Karya Tbk sangat penting dalam menerapkan PSAK 57 pada konteks proyek konstruksi, khususnya proyek yang melibatkan risiko tinggi seperti pembangunan jalan tol.

Dengan menggunakan sampel PT Holcim Indonesia Tbk., PT Aneka Tambang Tbk., dan PT Atlas Resources Tbk., ([Marsela et al., 2019](#)) telah mencatat PSAK 57 akibat besaran provisi tergantung pada cakupan atau kapasitas perusahaan dan operasi perusahaan dengan pendekatan penelitian berupa Studi Kepustakaan dalam data kualitatif deskriptif. Dalam penelitian ([Rengganis et al., 2023](#)) dengan pendekatan kualitatif deskriptif menggunakan data sekunder laporan keuangan PT. Aneka Tambang Tbk telah menerapkan PSAK 57 dalam mengakui provisi terkait dengan kewajiban perusahaan untuk melakukan pemulihan lingkungan setelah kegiatan operasionalnya. Sedangkan dalam penelitian ([Guntara & Ardiani, 2020](#)) perlakuan akuntansi yang diterapkan menggunakan metode kualitatif dengan data informasi laporan keuangan PT Indocement Tunggul Prakarsa Tbk., PT Semen Baturaja Tbk., dan PT Semen Indonesia Tbk yang diakses melalui Bursa Efek Indonesia sudah diterapkan secara patuh yang terdapat pada PSAK 57 seperti pengukuran, pencatatan, dan penyajian kewajiban provisi lingkungan. Selain itu, dalam penelitian ([Nisa et al., 2020](#)), menyimpulkan bahwa *green accounting* dan kinerja lingkungan mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap profitabilitas perusahaan, memanfaatkan sampel perusahaan pertambangan milik Bursa Efek Indonesia dalam kurun waktu 2014-2018 melalui metode penelitian asosiatif dan pendekatan kuantitatif serta laporan tahunan perusahaan pertambangan sebagai data pelengkap.

Beberapa penelitian sebelumnya berfokus pada implementasi PSAK 57 yang mempengaruhi kinerja lingkungan perusahaan atau *green accounting* terhadap profitabilitas perusahaan. Namun, penelitian ini hanya mencakup perusahaan yang beroperasi dalam sektor yang berbeda dan menggunakan pendekatan data sekunder dalam analisisnya. Sebaliknya, penelitian ini berfokus secara khusus pada penerapan PSAK 57 di sektor konstruksi, dengan objek penelitian PT Wijaya Karya Tbk (WIKA). Dalam penelitian ini, pendekatan kualitatif deskriptif dengan fokus utama dalam proyek konstruksi jalan tol dan belum banyak dieksplorasi dalam penelitian sebelumnya yang hanya menggunakan interpretasi data dan mengidentifikasi tantangan dalam mengungkap liabilitas kontinjensi.

Meskipun penelitian yang telah dilakukan ([Marsela et al., 2019](#)), ([Rengganis et al., 2023](#)), ([Guntara & Ardiani, 2020](#)), dan ([Nisa et al., 2020](#)) telah membahas penerapan PSAK 57 di beberapa sektor seperti pertambangan dan akuntansi lingkungan, namun masih ada kekurangan penelitian yang fokus pada penerapan standar itu di sektor konstruksi, terutama pada proyek

pembangunan jalan tol yang memiliki risiko kontinjensi yang tinggi. Penelitian sebelumnya cenderung menggunakan data yang sudah ada dan analisis berbasis angka, sehingga masih belum menggambarkan secara menyeluruh bagaimana PSAK 57 diterapkan secara praktis di lapangan. Di samping itu, sedikit yang telah mempelajari secara detail tentang cara mengungkapkan kewajiban kontinjensi dalam industri konstruksi, padahal hal ini sangat penting karena kompleksitas dan ketidakpastian dalam proyek-proyek tersebut. Tujuan penelitian ini adalah untuk melengkapi kekosongan tersebut dengan melakukan analisis kasus kualitatif yang difokuskan pada implementasi PSAK 57 oleh PT Wijaya Karya Tbk dalam proyek jalan tol, yang diharapkan dapat memberikan pemahaman baru mengenai hambatan dan potensi dalam mengelola kewajiban kontinjensi di sektor konstruksi.

Tujuan pada penelitian ini untuk menganalisis implementasi PSAK 57 pada PT Wijaya Karya Tbk, dengan fokus pada pengungkapan provisi, aset kontinjensi, dan liabilitas kontinjensi dalam proyek konstruksi jalan tol. Penelitian ini memiliki originalitas dalam menggabungkan pendekatan kualitatif deskriptif dengan studi kasus yang mendalam pada satu perusahaan, yang belum banyak dieksplorasi dalam penelitian sebelumnya. Manfaat penelitian ini adalah memberikan wawasan yang lebih mendalam bagi para praktisi dan akademisi mengenai pentingnya pengungkapan liabilitas kontinjensi yang tepat, serta menjadi referensi bagi perusahaan lain dalam menerapkan PSAK 57 secara efektif.

PSAK 57 (Dewan Standar Akuntansi Keuangan IAI, 2018)

PSAK 57 bertujuan mengatur:

- a. Pengakuan dan pengukuran provisi, kewajiban kontinjensi, dan aset kontinjensi, dan;
- b. Memeriksa informasi relevan, penting apabila ingin memastikan bahwa informasi telah disampaikan secara memadai dalam CALK mengenai sifat, waktu dan jumlah informasi.

Provisi

Provisi dalam proyek pembangunan jalan tol merupakan kewajiban dalam menyediakan dana pada proyek pembangunan jalan tol kemungkinan besar akan terjadi di masa depan, meskipun mengenai detail waktu dan jumlahnya yang belum pasti. Ketidakpastian ini meliputi biaya perawatan, perbaikan, atau penyelesaian masalah hukum yang mungkin timbul setelah jalan tol mulai dioperasikan. Menurut (Dewan Standar Akuntansi Keuangan IAI, 2018), provisi harus diakui jika terdapat kewajiban menghasilkan peristiwa lampau dan dipastikan akan membutuhkan arus keluar sumber daya ekonomi untuk menyelesaikannya. Dalam konteks pembangunan jalan tol, provisi sering kali melibatkan estimasi atas biaya yang tidak terduga seperti perubahan dalam regulasi, masalah geoteknis, atau risiko pembebasan lahan.

Perusahaan sering kali perlu melakukan revisi terhadap provisi yang telah diakui karena perubahan kondisi lapangan atau kebijakan pemerintah yang tak terduga. Ini menunjukkan betapa dinamisnya lingkungan proyek infrastruktur besar seperti jalan tol, di mana estimasi awal sering kali tidak cukup akurat dan membutuhkan penyesuaian seiring berjalannya waktu. (Hasan, 2022) Pengakuan provisi yang tidak tepat dapat berdampak signifikan terhadap laporan keuangan perusahaan. Dalam penelitiannya, Wijaya menyatakan, "Pengakuan provisi yang terlalu rendah dapat menyebabkan perusahaan terlihat lebih menguntungkan daripada kondisi sebenarnya, namun di sisi lain dapat menciptakan kesulitan finansial ketika kewajiban tersebut harus dipenuhi di masa depan." Temuan ini menunjukkan bahwa keakuratan dalam penghitungan provisi tidak

hanya penting untuk kepatuhan terhadap standar akuntansi, tetapi juga untuk menjaga stabilitas keuangan perusahaan dan memberikan gambaran yang akurat kepada para pemangku kepentingan. (Arum et al., 2023)

Liabilitas Kontinjensi

Kewajiban potensial yang mungkin timbul di masa depan tergantung pada hasil dari suatu kejadian yang tentatif merupakan liabilitas kontinjensi. Dalam konteks proyek infrastruktur besar seperti jalan tol, liabilitas kontinjensi sering kali terkait dengan risiko hukum, klaim dari pihak ketiga, atau permasalahan teknis yang mungkin memerlukan perbaikan di kemudian hari. Berdasarkan (Dewan Standar Akuntansi Keuangan IAI, 2018), liabilitas potensial tidak dilaporkan dalam laporan keuangan karena ketidakpastian, namun wajib dijelaskan dalam catatan laporan keuangan jika risiko terjadinya signifikan.

Perusahaan konstruksi sering kali menghadapi kesulitan dalam memperkirakan potensi kewajiban yang timbul akibat perubahan regulasi yang tak terduga, yang dapat mempengaruhi biaya proyek secara signifikan. Perusahaan yang gagal mengelola liabilitas kontinjensi dengan baik cenderung menghadapi volatilitas dalam kinerja keuangan mereka. Ketidakmampuan untuk mengantisipasi dan mengungkapkan liabilitas kontinjensi dapat menyebabkan penurunan kepercayaan investor dan peningkatan risiko kredit bagi perusahaan.

Aset Kontinjensi

Aset kontinjensi dalam pembangunan jalan tol mencerminkan potensi keuntungan yang dapat diperoleh dari situasi yang tidak pasti, seperti klaim asuransi dan pendapatan dari perjanjian kompensasi. Keberadaan aset ini sangat penting karena dapat mempengaruhi stabilitas finansial dan transparansi laporan keuangan perusahaan. Dalam konteks ini, penanganan aset kontinjensi memerlukan analisis menyeluruh terhadap risiko dan peluang yang terkait, serta dampaknya terhadap kelangsungan proyek infrastruktur. Oleh karena itu, pengelolaan yang tepat terhadap aset kontinjensi tidak hanya berfungsi untuk memitigasi risiko, tetapi juga untuk memaksimalkan nilai ekonomis dari proyek pembangunan jalan tol.

Perubahan regulasi dan kebijakan pemerintah sering kali menambah kompleksitas dalam mengidentifikasi dan mengukur aset kontinjensi. Mereka menekankan bahwa kebijakan yang tidak konsisten atau regulasi yang berubah-ubah dapat memperumit proses pelaporan dan penilaian aset kontinjensi, sehingga memerlukan penyesuaian strategi akuntansi dan pelaporan untuk memastikan akurasi dan kepatuhan terhadap standar yang berlaku.

Metode Penelitian

Objek penelitian ini berasal dari PT Wijaya Karya Tbk (WIKA) tahun 2023 yang telah tercatat dalam Bursa Efek Indonesia, perusahaan menargetkan status penerapan akuntansi lingkungan. Penelitian ini dilakukan secara deskriptif-kualitatif dengan tujuan untuk mengilustrasikan secara jelas dan rinci mengenai penerapan PSAK 57 di PT Wijaya Karya Tbk. Metode ini berfokus pada interpretasi data dan analisis mendalam daripada pada pengumpulan data kuantitatif atau numerik.

Penelitian ini juga menggunakan tinjauan literatur deskriptif mengenai PSAK 57, yang mengatur tentang Provisi, Liabilitas Kontinjensi, dan Aset Kontinjensi, menunjukkan bahwa standar ini memiliki peran penting dalam pengakuan dan pengukuran kewajiban yang tidak pasti dalam laporan keuangan. Pendekatan ini bertujuan untuk mengidentifikasi praktik perusahaan

terkait penerapan standar akuntansi dan masalah-masalah yang mungkin timbul dari data yang sudah dikumpulkan dan termasuk laporan keuangan tahunan perusahaan PT Wijaya Karya Tbk.

Menggunakan Analisis Deskriptif, yang bertujuan untuk mengevaluasi bagaimana PT Wijaya Karya Tbk menerapkan PSAK 57, terutama terkait dengan pengakuan kewajiban yang muncul dari proyek konstruksi jalan tol. Penelitian ini juga mengidentifikasi tantangan dalam pengungkapan kewajiban kontinjensi dan transparansi yang diperlukan.

Selain itu Evaluasi Kepatuhan, penelitian ini menilai sejauh mana perusahaan mematuhi standar akuntansi yang berlaku dan mengidentifikasi peluang untuk meningkatkan praktik akuntansi dan transparansi yang lebih baik. Metode dan teknik analisis ini berfokus pada pemahaman mendalam tentang penerapan standar akuntansi dalam praktik perusahaan, khususnya dalam konteks proyek konstruksi yang memiliki banyak aspek kontinjensi dan ketidakpastian.

Hasil dan Pembahasan

Menurut ([Dewan Standar Akuntansi Keuangan IAI, 2018](#)), perusahaan diwajibkan untuk mengakui provisi ketika terdapat kewajiban kini timbul dari peristiwa lampau dan pemenuhan kewajiban tersebut dapat menyebabkan keluarnya arus sumber daya yang memberikan manfaat ekonomi. Dalam konteks pembangunan jalan tol, terdapat berbagai risiko dan ketidakpastian yang harus diperhitungkan oleh perusahaan konstruksi. Hal ini mencakup risiko teknis, keuangan, dan hukum yang dapat mempengaruhi penyelesaian proyek.

Dalam pelaporan keuangan, PT Wijaya Karya Tbk harus mengungkapkan informasi yang relevan mengenai provisi dan liabilitas kontinjensi yang terkait dengan pembangunan jalan tol. Pengungkapan ini harus mencakup penjelasan mengenai sifat kewajiban, estimasi waktu penyelesaian, dan asumsi utama yang digunakan untuk menghitung provisi. Transparansi dalam pengungkapan informasi merupakan prasyarat mutlak untuk menyajikan gambaran yang akurat tentang risiko dan kewajiban perusahaan kepada seluruh pemangku kepentingan.

Dalam menilai biaya restrukturisasi yang melibatkan pembayaran pesangon, Grup menggunakan standar akuntansi PSAK 57. Khususnya, mengevaluasi apakah kontrak sewa yang ada dikategorikan sebagai kontrak memberatkan. Penilaian ini digunakan sebagai alternatif untuk menghitung penurunan nilai aset.

Provisi

Berdasarkan Standar Pelayanan Minimum (SPM) yang ditetapkan pemerintah, Wika wajib mengadakan pelapisan ulang jalan tol secara periodik. Dana yang dibutuhkan untuk kegiatan pemeliharaan ini telah dicadangkan dalam laporan keuangan perusahaan tahun 2023.

Dana cadangan untuk pelapisan ulang jalan tol akan disesuaikan secara berkala berdasarkan perkiraan lalu lintas. Nilai cadangan akan diakumulasikan dengan mengacu pada estimasi dana yang diperlukan selama memperbaiki jalan tol di masa depan, dengan memperhitungkan nilai uang saat ini. Peningkatan asset tidak lancar yang disebabkan peningkatan atas asset tak berwujud per tanggal 31 Desember 2023 Rp 1.117.702.426 juta dikarenakan penambahan pada hak konsesi jalan tol.

Tabel 1. Provisi dalam Laporan Posisi Keuangan Konsolidasian PT Wijaya Karya (Persero) Tbk dan Entitas Anak

ASET	2023	2022
------	------	------

Aset Takberwujud Rp 7,601,854,030 Rp 6,484,151,604
 Sumber: Data Olahan 2023 (Prospektus, 2023)

Tabel ini menunjukkan nilai aset takberwujud yang tercatat dalam laporan posisi keuangan konsolidasian PT Wijaya Karya Tbk untuk tahun 2022 dan 2023. Peningkatan signifikan pada aset takberwujud dari tahun 2022 ke 2023, yang disebabkan oleh penambahan hak konsesi jalan tol, menunjukkan bagaimana perusahaan mengakui provisi terkait kewajiban proyek pembangunan jalan tol. Provisi mencakup cadangan dana untuk pengeluaran masa depan yang kemungkinan besar akan terjadi tetapi dengan jumlah dan waktu yang belum pasti. Dalam konteks PT Wijaya Karya Tbk, peningkatan aset tak berwujud terkait dengan penambahan pada hak konsesi jalan tol. Hal ini mencerminkan kebutuhan untuk mencadangkan dana guna pemeliharaan dan pelapisan ulang jalan tol sesuai dengan Standar Pelayanan Minimum (SPM). Karena aset tak berwujud seperti hak konsesi memiliki kewajiban terkait di masa depan, maka terkait dengan pengakuan provisi.

Liabilitas Kontinjensi

Dalam laporan keuangan tahun 2023, tercatat adanya bank garansi yang diberikan oleh WIKA Serpan kepada Bank Mandiri sebagai jaminan pelaksanaan proyek pembangunan tol Serang-Panimbang.

Baik kontrak jaminan keuangan maupun jaminan untuk memberikan pinjaman dengan suku bunga di bawah pasar akan terus meningkat nilainya setelah diakui secara akuntansi.

Grup mengakui pesangon sebagai liabilitas dan beban jika hal berikut ini terjadi:

- Jika Grup tidak mampu lagi menarik tawaran atas imbalan tersebut; dan
- Jika Grup mencatat restrukturisasi, termasuk pembayaran pesangon dalam PSAK 57.

Manfaat pesangon dinilai pada saat pengakuan awal dan disesuaikan secara berkala berdasarkan jenis imbalan kerja.

Imbalan Kerja Jangka Panjang Lainnya

Imbalan jangka panjang lainnya seperti cuti dinilai setara dengan imbalan pascakerja, kecuali liabilitas revaluasi diakui dalam laba rugi.

Tabel 2. Liabilitas Kontinjensi dalam Laporan Arus Kas Konsolidasian PT Wijaya Karya (Persero) Tbk dan Entitas Anak

Arus Kas dari Aktivitas Investasi	2023	2022
Penambahan Jaminan Usaha	Rp 3,065,520	Rp 228,760,981

Sumber: Data Olahan 2023

Tabel ini menampilkan arus kas yang terkait dengan aktivitas investasi, khususnya penambahan jaminan usaha. Liabilitas kontinjensi tercermin dari peningkatan jumlah jaminan yang diberikan oleh PT Wijaya Karya Tbk tahun 2023 dalam bentuk bank garansi, yang diperlukan untuk mendukung pelaksanaan proyek jalan tol Serang-Panimbang. Jaminan usaha, seperti bank garansi yang diberikan sebagai jaminan pelaksanaan proyek, merupakan kewajiban potensial yang

bisa menjadi nyata tergantung pada hasil di masa depan, seperti penyelesaian proyek tanpa masalah. Oleh karena itu, hal ini dikategorikan sebagai liabilitas kontinjensi karena tidak ada kepastian bahwa kewajiban ini akan mengharuskan arus kas keluar, tetapi tetap perlu diungkapkan karena adanya risiko.

Aset Kontinjensi - Kontrak Merugi

Penurunan nilai aset keuangan Grup dalam Catatan Atas Laporan Keuangan PT Wijaya Karya Tbk tahun 2023 mencerminkan kerugian kredit ekspektasian atas aset keuangan yang dinilai pada biaya perolehan diamortisasi dan aset finansial yang dinilai berdasarkan *Fair Value Through Other Comprehensive Income*.

Jika risiko kredit suatu instrumen keuangan meningkat secara signifikan sejak pengakuan awal, Grup menelaah penyisihan kerugian instrumen keuangan pada setiap tanggal neraca berdasarkan jumlah kerugian kredit yang diperkirakan terjadi pada periode tersebut. Tetapi, jika tidak terjadi peningkatan yang signifikan pada risiko kredit suatu instrumen keuangan sejak pengakuan awal, maka Grup harus mengakui kerugian pada kredit ekspektasian selama periode 1 tahun.

Grup menggunakan sistem yang dirancang secara sederhana untuk mengukur kerugian kredit ekspektasian berdasarkan piutang komersial dengan aset kontrak yang tidak mengandung komponen keuangan signifikan.

Jika pihak ketiga gagal memenuhi tanggung jawab kreditnya kepada Grup, maka aset keuangan pun akan dianggap mengalami gagal bayar. Rentang waktu maksimal yang dipertimbangkan ketika memperhitungkan kerugian kredit ekspektasian yaitu rentang waktu kontraktual maksimal dimana Grup terbuka terhadap hal yang membahayakan atau merugikan kredit.

Tabel 3. Aset Kontinjensi - Kontrak Merugi dalam Laporan Laba Rugi dan Penghasilan Komprehensif Lain Konsolidasian PT Wijaya Karya (Persero) Tbk dan Entitas Anak

Beban Usaha	2023	2022
Bagian Rugi Entitas Asosiasi	Rp 91,143,623	Rp 99,355,029

Sumber: Data Olahan 2023

Tabel ini menguraikan beban usaha terkait dengan bagian rugi entitas asosiasi, yang mencerminkan kontrak merugi dan aset kontinjensi. Aset kontinjensi ini biasanya terkait dengan potensi klaim asuransi atau pengembalian dari litigasi, yang dapat memengaruhi laba rugi perusahaan. Penurunan nilai aset keuangan menunjukkan adanya kerugian kredit ekspektasian, yang harus diuji dan diakui secara akurat dalam laporan keuangan untuk memastikan kepatuhan terhadap PSAK 57. Aset kontinjensi kontrak merugi mencakup potensi manfaat di masa depan yang belum pasti, yang dalam hal ini terkait dengan entitas asosiasi. Bagian rugi dari entitas asosiasi dapat mencerminkan ekspektasi kerugian kredit atau kewajiban yang akan mempengaruhi aset keuangan. Kerugian tersebut merupakan bagian dari pengukuran yang dilakukan untuk menentukan nilai aset keuangan yang mengalami penurunan dan dianggap relevan dalam konteks kontrak merugi.

PT Wijaya Karya Tbk (WIKAT) telah berhasil mengimplementasikan PSAK 57 dengan baik, sebagaimana dibuktikan oleh pengakuan dan pengukuran provisi, aset kontinjensi serta liabilitas kontinjensi yang diungkapkan dalam laporan keuangannya. Implementasi ini sesuai dengan

ketentuan PSAK 57 yang mengharuskan pengakuan kewajiban yang mungkin timbul dari peristiwa lampau dan membutuhkan arus keluar sumber daya di masa depan. WIKA telah melakukan estimasi yang hati-hati terhadap biaya yang terkait dengan proyek-proyek besar, seperti pembangunan jalan tol, serta mengungkapkan potensi liabilitas dan aset kontinjensi yang mungkin berdampak pada kinerja keuangan perusahaan. Transparansi ini menunjukkan kepatuhan WIKA terhadap standar akuntansi yang berlaku, yang esensial untuk menjaga kepercayaan pemangku kepentingan dan memastikan laporan keuangan yang akurat dan dapat diandalkan.

Simpulan

Implementasi PSAK 57 oleh PT Wijaya Karya Tbk tahun 2023 telah dijalankan dengan baik, terutama dalam pengakuan provisi terkait kewajiban yang mungkin timbul dari proyek pembangunan jalan tol. Provisi ini diakui berdasarkan estimasi yang hati-hati terhadap biaya yang mungkin muncul di masa depan, seperti biaya perbaikan atau penyelesaian masalah hukum. Meski demikian, terdapat tantangan dalam pengungkapan aset kontinjensi dan liabilitas kontinjensi yang belum pasti. Ketidakpastian terkait perubahan regulasi, kondisi ekonomi, dan risiko teknis menambah kompleksitas dalam pelaporan keuangan. Penelitian ini menghasilkan ilustrasi yang jelas terkait bagaimana PT Wijaya Karya Tbk mengelola aspek-aspek akuntansi yang berkaitan dengan kewajiban kontinjensi dan ketidakpastian, yang pada akhirnya mempengaruhi laporan keuangan perusahaan. Keterbatasan dari studi ini adalah fokus yang hanya pada satu perusahaan dan satu jenis proyek konstruksi, yang mungkin tidak sepenuhnya menggambarkan penerapan PSAK 57 di seluruh industri konstruksi.

Daftar Pustaka

- Arum, E. D. P., Wijaya, R., Wahyudi, I., & Brilliant, A. B. (2023). *Corporate Governance and Financial Statement Fraud during the COVID-19: Studi of Companies under Special Monitoring in Indonesia*. 16(7).
- Dewan Standar Akuntansi Keuangan IAI. (2018). *Standar Akuntansi Keuangan*. 934.
- Endaryati, E. (2022). *Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK)*.
- Guntara, R., & Ardiani, N. L. G. D. (2020). *Penerapan Akuntansi Kewajiban Provisi Lingkungan Pada Perusahaan Sektor Industri Semen*. 5(1).
- Hasan, H. (2022). *Assessing the Potential of Private Participation in Financing the Indonesian Railway*.
- Marsela, I., Mediaty, & Said, D. (2019). *Analisis Implementasi Tanggungjawab Lingkungan Perusahaan Berbasis PSAK No. 57 (Studi Kasus: PT. Holcim Indonesia Tbk., PT. Aneka Tambang Tbk., dan PT. Atlas Resources Tbk)*.
- Nisa, A. C., Malikah, A., & Anwar, S. A. (2020). *Analisis Penerapan Green Accounting Sesuai PSAK 57 dan Kinerja Lingkungan Terhadap Profitabilitas Perusahaan Pertambangan (Studi Empiris pada Perusahaan yang Lising di Bursa Efek Indonesia tahun 2014-2018)*. 09(03).
- Prospektus. (2023). *PT. Wijaya Karya Tbk. September, 2006*.
- Randy, M., Mais, R. G., Gie, K., Tinggi, S., Ekonomi, I., & Jakarta, I. (2024). Tantangan Akuntan Publik Dalam Menyongsong Kemajuan Teknologi Dalam Akuntansi. *Jurnal Ilmiah Kajian Multidisipliner*, 8(4), 2118–7302.
<https://sejurnal.com/1/index.php/jikm/article/view/1205%0Ahttps://sejurnal.com/1/index.ph>

[p/jkm/article/download/1205/1405](http://jkm/article/download/1205/1405)

Rengganis, A. P., Kinari, B. K., & Uzliawati, L. (2023). *Analisis Penerapan PSAK 57 terkait Tanggung Jawab Lingkungan Perusahaan pada PT Aneka Tambang Tbk.* 6(2).

Suriawinata, I., Budiyanti, E., Mais, R., & Anhar, M. (2023). Cash Conversion Cycle, Asset. *Jurnal Reviu Akuntansi Dan Keuangan*, 13(3), 674–695.

<https://doi.org/10.22219/jrak.v13i3.25161>

Tommy. (2022). *Apa Itu PSAK Dan Apa Kaitannya dengan Pajak?*